

POSDAYA, MOMENTUM KEBANGKITAN EKONOMI UMAT

Luluk Indarinul Mufidah
STAI Miftahul ‘Ula Kertosono Nganjuk
lulukinda@gmail.com

Abstract:

Indonesian population growth shows the rapid development, it's shown by the results of the projection that for twenty-five next years, increasing from 205.100.000 in 2000 into 273.200.000 in 2025 (URwww.datastatistik-indonesia.com). It will cause a lot of issues, such as unemployment, increasing levels of poverty, public health, namely the spread of infectious disease, malnutrition children, etc. this condition requires the presence of efforts at community empowerment through POSDAYA (Pos Pemberdayaan Keluarga). The establishment of quality family is not only the responsibility of government alone, but also required the active participation of the community, so it is needed a good cooperation among the community and government to create an independent community. POSDAYA is the one of excellent breakthrough in creating independent community.

Keywords: POSDAYA, Development Economic

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan yang cukup kompleks yang dialami oleh Negara berkembang, khususnya Indonesia. Pada setiap tahunnya angka kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Kemiskinan menjadi fokus utama bagi pemerintah, karena apabila kemiskinan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah maka cita-cita Negara ini untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera tidak akan tercapai. Kemiskinan dapat di definisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Sedangkan menurut Bappenas (2016), kemiskinan didefinisikan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada pada diri seseorang.¹

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, (Jakarta: BPS, 2016).

Menurut John Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial seperti yang dimaksudkan oleh Friedman tersebut meliputi:

1. Modal produktif atas aset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, pendidikan dan kesehatan.
2. Sumber keuangan, seperti pendapatan dan kredit yang memadai.
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.
4. *Network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
5. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.²

Ada beberapa ukuran kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia dewasa ini, diantaranya adalah ukuran dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS), dan World Bank. Kriteria BKKBN, kondisi miskin atau kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya.
2. Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari.
3. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan berpergian.
4. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah.
5. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.³

Sedangkan kriteria menurut BPS, seseorang dikatakan pada kondisi miskin apabila seseorang itu hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori perkapita perhari. Kriteria yang ditampilkan oleh *World Bank* adalah dimana keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 perhari.⁴

Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen dari jumlah seluruh penduduk. Penduduk miskin ini menjadi perhatian pemerintah sehingga banyak upaya pemerintah dalam melakukan proses pembangunan untuk masyarakat miskin.

² John Friedman and Clyde Weaver, *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*, (Berkeley: University of California Press, 1979), 97.

³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (Online) (2016), <http://bappenas.go.id/>, [Diakses 3 Oktober 2016].

⁴ Ibid.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan ini telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan cara pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mampu berdaya dan dapat ditumbuh kembangkan, sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan sekaligus sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pembangunan yang terungkap definisi UNESCO, yang mengatakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat bukan membangun barang melainkan membangun orang dan membangun masyarakat. Pernyataan tersebut memang tidak harus diartikan bahwa dalam pembangunan masyarakat upaya untuk membangun hal-hal yang bersifat fisik atau kebendaan diabaikan. Pembangunan fisik tetap diperlukan, tetapi dalam rangka mendukung pembangunan aspek manusia dan masyarakatnya lebih diperhatikan, bukan sebaliknya. Dengan adanya pembangunan diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tinggi rendahnya nilai indeks pembangunan manusia. Nilai indeks pembangunan manusia adalah suatu indeks komposit yang dihitung dari angka harapan hidup sebagai cerminan tingkat kesehatan, tingkat melek huruf dewasa, dan angka partisipasi kasar yang mencerminkan penguasaan pengetahuan, dan PDB sebagai indikasi kelayakan hidup (Hubeis AV, 2010:24).⁵

Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan nilai indeks pembangunan manusia maka mengindikasikan bahwa sudah ada *trend* perbaikan kualitas manusia. Akan tetapi di Indonesia angka indeks pembangunan manusia masih rendah sehingga perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia karena manusia merupakan unsur terpenting dari pembangunan. Pembangunan dapat dilakukan secara dua arah yaitu *top down* dan *bottom up*. Pada saat ini, pembangunan secara *bottom up* menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pada proses pembangunan secara *bottom up* ini masyarakat diperlakukan sebagai subjek dan aktor atau pelaku dari proses pembangunan, karena pada pembangunan semestinya mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada proses. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia, karena yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara

⁵ Philip Allmendinger, *Towards a Post-Positivist Typology of Planning Theory*, *Planning Theory* 1, (t.t.: t.p., 2002), 77-99.

material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil yang sudah direncanakan dapat tercapai.⁶ Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran.

Salah satunya dengan pembangunan masyarakat yang berbasis keluarga atau yang sering dikenal dengan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA). POSDAYA adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan dan pendidikan, sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Apabila memungkinkan POSDAYA bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga secara terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri. Upaya-upaya yang dilakukan melalui POSDAYA dikembangkan secara bertahap, dan terutama ditujukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI). Gerakan POSDAYA kini sedang diterapkan di sejumlah daerah di seluruh Indonesia dengan melibatkan segenap komponen masyarakat beserta jajaran pemerintah daerah.⁷

Istilah “Pemberdayaan” mulai mengemuka pada periode 1970 hingga 1980-an. Pada masa itu Indonesia merupakan negara acuan dunia di bidang pembangunan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Pemasyarakatan Keluarga Berencana (KB) merupakan kunci utama pengembangan pemberdayaan masyarakat saat itu. Ditopang dengan berbagai program lain yang sejalan, KB menjadi faktor penting menurunnya angka kemiskinan secara nyata. Program lain tersebut adalah pengembangan ‘SD Inpres’ di bidang pendidikan, Posyandu dan Puskesmas di bidang kesehatan, Koperasi Unit Desa (KUD) serta Bimas Pertanian di bidang ekonomi, juga infrastruktur Listrik Masuk Desa.⁸

Melalui POSDAYA diharapkan masyarakat dapat meningkatkan fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan serta pada akhirnya meningkatnya taraf hidup keluarga serta menumbuhkan kembali rasa gotong royong antar sesama yang mulai luntur oleh waktu. Visi POSDAYA adalah terciptanya organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) di tingkat kelurahan/desa yang memiliki kemampuan

⁶ T. Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2000), 98.

⁷ G. Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 3.

⁸ Haryono Suyono dan Rohadi Haryanto, *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), xi.

strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Sedangkan Misinya adalah membangun masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal agar menjadi penggerak, motivator dan inisiator terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk secara mandiri melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk dengan menjalin kerjasama sinergis dengan pihak lain baik Pemda, dunia usaha, dll.⁹

Pembahasan

A. POSDAYA

Menurut Suyono dan Haryanto (2009) POSDAYA adalah forum komunikasi, silaturahmi, advokasi, penerangan dan pendidikan, sekaligus wadah kegiatan penguatan fungsi keluarga secara terpadu. Apabila memungkinkan POSDAYA bisa dikembangkan sebagai wadah pelayanan keluarga secara terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, wirausaha, dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri.¹⁰

Terpadu berarti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi program melibatkan berbagai petugas atau sukarelawan secara terkoordinasi, serasi dan dinamis, yaitu antara petugas pemerintah, organisasi sosial, dan unsur-unsur masyarakat. Penyerasian dinamis disini berarti diperlukan adanya keserasian dalam hal memadukan kepentingan masyarakat dan kemampuan penyediaan bantuan profesional dari pemerintah dan swasta yang disediakan untuk mendukung kegiatan.¹¹

Upaya pemberdayaan yang ditawarkan dalam POSDAYA diarahkan untuk mendukung penyegaran fungsi keluarga, yaitu keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi dan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pemenuhan fungsi-fungsi ini pada hakekatnya bermuara pada pemenuhan tujuan dan sasaran pembangunan abad millenium (MDGs) yang ditetapkan sebagai

⁹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 34.

¹⁰ Usman Yatim, "Pengembangan Posdaya Sebagai Upaya Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan (Studi POSDAYA di Kelurahan Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat)", *Thesis*, (Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2010).

¹¹ Suyono, *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*, 8.

program pembangunan di Indonesia dan dalam peningkatan *Human Development Index*. POSDAYA adalah model untuk memberdayakan semua keluarga, dan memelihara keharmonisan dalam keluarga dan antara keluarga (Yayasan Damandiri, 2010).¹²

Mulyono (2010) menyatakan bahwa POSDAYA diciptakan untuk merespon usulan pemerintah untuk membangun manusia sumber daya melalui partisipasi aktif dalam keluarga. Proses pemberdayaan yang memprioritaskan peningkatan kemampuan keluarga untuk dapat mengusahakan agar dapat menghapuskan kebodohan, kemalasan dan kemiskinan dalam arti luas. Sasaran kegiatan POSDAYA adalah menerapkan upaya bersama sehingga setiap keluarga memiliki kemampuan untuk melakukan delapan fungsi keluarga. Untuk pengembangan lebih lanjut dari POSDAYA, bahwa perlu penegasan kembali tujuan POSDAYA, penyegaran anggota komite dan kader POSDAYA, mengintensifkan resosialisasi POSDAYA kepada semua pihak dari masyarakat, tokoh masyarakat, desa, pejabat kabupaten dan pemerintah daerah dan membangun produktif jaringan bisnis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, perlu adanya pengembangan dan penguatan kegiatan POSDAYA di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. POSDAYA sebagai partisipatif model pengembangan masyarakat telah terbukti kinerja yang sukses sebagai program telah menghasilkan perubahan positif baik fisik maupun non fisik masyarakat. Perubahan ini termasuk opini publik program dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan lingkungan. Tujuan dari program pemberdayaan keluarga adalah untuk mendukung keluarga dalam mencapai tujuan mereka.¹³

POSDAYA sebagai model pemberdayaan masyarakat di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Program-program advokasi dan pemberdayaan pembangunan yang ditawarkan dalam POSDAYA adalah program-program yang mendukung penyegaran fungsi-fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Penguatan fungsi-fungsi

¹² Tri Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2012), 12.

¹³ Agnes Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2013), 76.

utama tersebut diharapkan memungkinkan setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang mandiri, dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga sejahtera yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga yang intinya adalah keikutsertaan dalam program kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang mapan.

Dalam melaksanakan fungsinya, POSDAYA merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan anggotanya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kemampuan dan swadaya masyarakat sebagai upaya memberdayakan keluarga sejahtera dan membangun kesejahteraan rakyat secara luas. POSDAYA bukan dimaksudkan untuk mengganti pelayanan sosial ekonomi kepada masyarakat berupa pelayanan terpadu, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk mengembangkan forum pemberdayaan terpadu yang dinamis, yaitu pemberdayaan pembangunan kepada pimpinan keluarga yang dipadukan satu dengan lainnya. Tujuannya adalah agar pimpinan keluarga mengetahui peran dan fungsinya, yang pada akhirnya bisa melakukan pemberdayaan untuk anggota keluarganya secara mandiri. Terpadu berarti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi melibatkan berbagai petugas atau sukarelawan secara terkoordinir, yaitu petugas pemerintah, organisasi sosial, dan unsur-unsur masyarakat. Posdaya dikembangkan secara bertahap, mulai yang bersifat sederhana dengan kegiatan terbatas sampai akhirnya tergantung dukungan masyarakatnya.

POSDAYA ditujukan dan sebagai wadah bagi keluarga yang kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya umumnya lemah, untuk bersatu diantara mereka dan bersama keluarga lain yang mampu atau keluarga yang termasuk dalam kondisi kurang sejahtera atau masih dalam indikator kemiskinan. Setiap keluarga yang pada dalam kondisi kurang mampu ini harus mendapatkan proses pembangunan untuk mengentaskan kondisi kemiskinan yang membelenggu mereka. Tujuan pembentukan POSDAYA adalah (P3M, 2011):

1. Menyegarkan modal sosial seperti hidup gotong royong dalam masyarakat untuk membanlu pemberdayaan keluarga secara terpadu dan membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
2. Ikut memelihara lembaga sosial kemasyarakatan yang terkecil, yaitu keluarga, yang dapat menjadi perekat masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai dan memiliki dinamika tinggi.
3. Memberi kesempatan kepada setiap keluarga untuk memberi atau menerima pembaharuan yang dapat dipergunakan dalam proses pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁴

Pegertian partisipasi menurut Mikkelsen dapat dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 17.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.¹⁵

Usaha pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa adanya usaha partisipasi masyarakat secara aktif dalam program-program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang merata antara perencana dengan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Proses pembangunan masyarakat dengan metode pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat itu berjalan baik sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Cohen dan Uphoff membedakan tahapan partisipasi menjadi empat jenis yaitu, pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.¹⁶

1. Tahap pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan. Sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program.
3. Tahap pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.
4. Tahapan dalam evaluasi, tahapan partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi

¹⁵ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, terj. Matheos Nalle, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 91.

¹⁶ Siti Irene A.D., *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 61.

ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya, serta dapat member masukan demi perbaikan program selanjutnya.¹⁷

Ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Belum ada satu kepaahaman konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Belum ada kepaahaman konsep di sini dapat diartikan sebagai keinginan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana, program yang akan dilaksanakan belum dapat diterima baik karena ketidakpaahaman prosedur atau cara yang akan dilaksanakan oleh perencana.
2. Reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat diperlakukannya ideology developmentalisme di Indonesia. Pengamanan yang ketat terhadap proses pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini seperti muncul budaya diam di kalangan masyarakat yang hasilnya adalah keenganan masyarakat untuk mengevaluasi proses pembangunan secara kritis dan terbuka. Hal inilah yang dapat melemahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁸

Partisipasi masyarakat dipandang sebagai komponen penting dalam proses pembangunan, karena:

1. Partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai keadaan kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan tidak akan berhasil.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut.
3. Berkaitan dengan demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Loekman Soetrisno, *Menuju Partisipasi Masyarakat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

¹⁹ Diana Conyers, *An Introducting to Social Planning in the Third World*, terj. Susetiawan, (New York: University of Nothingham, 1992), 104-105.

Menurut Wijaya (1979:6) partisipasi harus berupa pengontrolan dan sekaligus pengabdian untuk kepentingan bersama. Di samping itu di dalam partisipasi terkandung unsur-unsur: keterlibatan fisik, mental, perasaan, dan tanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut kebutuhan diri, keluarga dan masyarakat atau tanggung jawab terhadap karya-karya yang telah dihasilkan.

Dalam hal partisipasi, masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, yaitu :

1. Identifikasi permasalahan, dimana masyarakat bersama dengan perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut mengidentifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, *brain storming*, identifikasi peluang, potensi dan hambatan.
2. Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasarkan pada hasil identifikasi.
3. Pelaksanaan proyek pembangunan, proses dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang sudah direncanakan.
4. Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kebermanfaatan bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan.
5. Mitigasi, yaitu kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negative pembangunan.
6. Monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini, juga memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.²⁰

C. Ekonomi

Pemberdayaan dalam bidang ekonomi sebagai salah satu pilar kegiatan POSDAYA merupakan upaya untuk mempersiapkan kemandirian keluarga-keluarga Indonesia. Jadi dari aspek ekonomi kegiatan yang dapat dikembangkan melalui POSDAYA adalah mempersiapkan masyarakat untuk bisa mandiri. Dalam

²⁰ Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), 59.

pemberdayaan ekonomi, keluarga yang menjadi sasaran melalui POSDAYA tidak hanya dari keluarga-keluarga yang relatif sudah berkemampuan, tetapi juga ada yang belum sejahtera. Disinilah kelebihan dari POSDAYA, karena kelompok-kelompok POSDAYA tidak hanya berasal dari kelompok orang yang tidak/belum sejahtera saja, tetapi juga terbuka untuk keluarga-keluarga yang telah sejahtera.

Secara umum nilai faktor-faktor pendorong dalam pengembangan POSDAYA lebih tinggi daripada nilai faktor-faktor penghambat. Hal ini mengindikasikan bahwa POSDAYA berada pada posisi tumbuh dan berkembang, oleh karena daya dorongnya lebih kuat daripada daya hambatnya. Faktor pendorong dalam pengembangan ekonomi tersebut, yakni kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, baik pemerintah daerah maupun pusat. Daya dorong pengembangan ekonomi POSDAYA berasal dari faktor internal (kekuatan), yakni dengan kegiatan usaha berbasis lokal dan kegiatan arisan, sedangkan faktor eksternal (peluang) adalah perubahan kondisi perekonomian di masyarakat dan kebijakan pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, daya hambat pengembangan ekonomi POSDAYA juga berasal dari faktor internal (kelemahan), yakni usahanya yang belum dikenal pasar dan besarnya tanggungan keluarga. Sedangkan daya hambat faktor eksternal (ancaman) adalah masuknya produk impor dan daya beli yang menurun. Pada kondisi ini strategi alternatif yang dapat dikembangkan adalah intensif strategi yaitu berupa pengembangan produk dan penetrasi pasar misalnya mengembangkan jaringan pasar dan mengikuti program promosi pemerintah daerah.

D. Program Pengembangan POSDAYA

Berikut beberapa peran POSDAYA di masyarakat, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas program jika program tersebut sudah ada di masyarakat.
2. Menghidupkan kembali program yang pernah ada
3. Menginisiasi dan melaksanakan program-program yang belum ada.
4. Mensinergikan program-program yang sudah ada di masyarakat.
5. Melakukan kerjasama dan membangun jejaring dengan pihak terkait untuk melaksanakan program.

Program-program pembangunan yang ada di Pemda seperti pelatihan sangat berpeluang dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi sehingga lebih

dapat mengakomodir kesesuaian peserta dan kebutuhan pelatihan peserta. Dinas-dinas yang belum banyak diakses perlu segera dilibatkan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Lingkungan dan juga Dinas Koperasi. Demikian juga untuk program sosialisasi Posdaya kepada seluruh Camat adalah sangat diperlukan. Program pengembangan Posdaya sebaiknya masuk dalam APBD karena ini sangat sesuai dengan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Adapun program-program pembangunan dari berbagai pihak seharusnya dapat memilih POSDAYA sebagai wadah implementasi program meskipun nantinya kegiatannya akan disesuaikan dengan titik konsentrasi pada suatu pilar yang ada di POSDAYA tersebut, misalnya kegiatan pengembangan ekonomi kepada kelompok UMKM atau pengrajin. POSDAYA juga perlu disosialisasikan di tingkat pimpinan, misalnya saja dalam kesempatan musrenbang. Demikian pula pihak swasta juga perlu didekati untuk ikut aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui POSDAYA. Meskipun pada umumnya pihak swasta juga memiliki program tertentu untuk pemberdayaan masyarakat.

Strategi pengembangan program yang dapat dilakukan antara lain:

1. Ekonomi: Lembaga keuangan mikro (simpan pinjam) sangat memungkinkan dikembangkan dan sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha masyarakat. Selain itu untuk keperluan sosial dan pendidikan LKM juga banyak membantu keperluan masyarakat. Terutama untuk menghindarkan masyarakat dari bank keliling. Program pelatihan untuk budidaya pertanian juga diperlukan bagi masyarakat untuk lebih baiknya usaha yang dilakukan. Selain itu, perlu juga diadakan program pelatihan dan aplikasi pengemasan.
2. Pendidikan: Peningkatan kapasitas guru-guru PAUD dan penguatan kurikulum PAUD, dan bagi anak SD/SMP dapat dikembangkan program BIMBEL. Penguatan data untuk kejar fungsional dan kejar paket A, B dan C. Pengembangan program taman baca masyarakat dan meningkatkan aktivitas majelis ta'lim warga. POSDAYA adalah sebuah kelembagaan yang potensial untuk dijadikan sebagai lokasi wisata pendidikan dan pemberdayaan yaitu dalam bentuk wisata POSDAYA.

3. Kesehatan: penguatan program posyandu, pembinaan bina kelompok lansia (BKL), Pembinaan Kesehatan reproduksi remaja (BKR), pembinaan bina kelompok balita (BKB).
4. Lingkungan: Penghijauan wilayah kerja POSDAYA yang sempit dapat dilakukan dengan memanfaatkan pot, bekas drum (tong) dengan berbagai tanaman yang diperlukan, termasuk tanaman buah ataupun sayuran. Lahan yang masih ada dan belum dimanfaatkan di pekarangan masyarakat sangat baik kalau bisa dikelola bersama/terintegrasi antar rumah sehingga hasilnya dapat meningkatkan nilai ekonomi yang menjadi potensial untuk diperdagangkan. Program vertikultur dan hidroponik serta demplot pertanian juga sesuai untuk mengembangkan kebun bibit desa dan kebun bergizi. Perlu dikembangkan pula kegiatan pengelolaan sampah lingkungan dengan cara pengomposan dan lainnya.
5. Program-Program yang bersifat umum: Diadakannya berbagai pelatihan bagi POSDAYA yang dilakukan dengan metode praktek dan dilaksanakan langsung di POSDAYA dan dapat diikuti oleh banyak orang (bukan hanya perwakilan). Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan-pelatihan motivasi untuk membangkitkan semangat kebersamaan dan semangat membangun diri, baik untuk pengurus maupun bagi masyarakat. Asosiasi POSDAYA kecamatan juga perlu diaktifkan sebagai wadah kerjasama, dengan cara mengaktifkan pertemuan rutin asosiasi.

Dalam usaha menggerakkan POSDAYA perlu diaktifkan masyarakat secara umum, jadi tidak hanya mengandalkan pengurus resmi POSDAYA saja. Untuk mensosialisasikan POSDAYA dapat ditempuh dengan cara para kader aktif sebagai pengurus RT atau RW, sehingga mempunyai banyak kesempatan untuk mensosialisasikan POSDAYA. Selain itu perlu juga memperluas kepengurusan POSDAYA, merapikan kesekretariatan dan membenahi kepengurusan. Kesempatan menjadi tuan rumah juga perlu diprogramkan untuk meningkatkan kualitas POSDAYA dan pertemuan secara rutin juga perlu diadakan untuk mengembangkan POSDAYA.

Penutup

POSDAYA adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal-hal tertentu bisa juga menjadi wadah pelayanan keluarga secara terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya agama, pendidikan, kesehatan, wirausaha dan lingkungan hidup, sehingga keluarga secara harmonis bisa tumbuh mandiri di desanya.

POSDAYA dibangun sebagai forum untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan terpadu yang dinamis, yaitu pemberdayaan pembangunan untuk seluruh anggota keluarga yang dipadukan dengan saling terkait. Tujuannya adalah agar pimpinan keluarga mengetahui peran dan fungsinya yang lengkap sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Akhirnya setiap kepala keluarga dan anggotanya bisa saling mengingatkan untuk melakukan pemberdayaan seluruh anggota keluarga secara mandiri. Sasaran program sebagai pendampingan dan penguatan dalam pengembangan POSDAYA yaitu melalui Bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan program-program yang bersifat umum lainnya.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Allmendinger, Philip. *Towards a Post-Positivist Typology of Planning Theory, Planning Theory 1*. t.t.: t.p., 2002.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (Online) (2016), <http://bappenas.go.id/>, [Diakses 3 Oktober 2016].
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS, 2016.
- Conyers, Diana. *An Introducting to Social Planning in the Third World*, terj. Susetiawan. New York: University of Nothingham, 1992.
- D, Siti Irene A. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Friedman, John and Clyde Weaver. *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*. Berkeley: University of California Press, 1979.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Kartasasmita, G. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, terj. Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Soetrisno, Loekman. *Menuju Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Sunartiningih, Agnes. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2013.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Supriatna, T. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2000.
- Suyono, Haryono dan Rohadi Haryanto. *Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Winarni, Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 2012.
- Yatim, Usman. “Pengembangan Posdaya Sebagai Upaya Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Rangka Mengatasi Kemiskinan (Studi POSDAYA di Kelurahan Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat)”, *Thesis*. Yogyakarta: Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2010.